

**ONTOLOGI *POST-TRUTH* DIALEKTIKA ANTARA  
ESENSI KEBENARAN DAN ENTITAS KEBENARAN  
DALAM FENOMENA PEMILIHAN PEMIMPIN**

**Ainur Rahman Hidayat**

Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan

Email: ainurrahman94@gmail.com

Article History

Submitted: 19 Maret 2024

Revised: 15 April 2024

Accepted: 25 April 2024

How to Cite:

Hidayat, Ainur Rahman. "Ontologi Post-Truth Dialektika Antara Esensi Kebenaran dan Entitas Kebenaran dalam Fenomena Pemilihan Pemimpin" *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 21, no. 1 (2024): 129-143.



**Abstrak:**

The entity of truth in post-truth Indonesia is often analysis and interpreted separately from its way of being, both on a national and international scale. Such an understanding of the truth of the post-truth phenomenon always leads to the entity of solipsistic truth, because the post-truth phenomenon ontologically does not arise in a vacuum in the process of its interpretation, but rather exists alongside non-post-truth phenomena. In addition, the truth entity of the post-truth phenomenon is inherently also a very vague knowledge about reality, facts, and data. The truth entity of the post-truth phenomenon can be understood through the approach of three basic characteristics of truth analysis ontologically, namely facticity, understanding, and fallenness. The meaning of the truth of the post-truth phenomenon in Indonesia becomes increasingly unclear when the existence of the truth entity and the essence of truth are merely assumed without knowing the distinction between them. Understanding certain truth entities is part of ontological analysis, which concerns the meaning of truth and the way of existing in a particular world, for example, the truth entity of the political world. Meanwhile, understanding the essence of truth is part of ontic analysis, which concerns what truth actually is. Ontic analysis of the essence of truth is an analysis that results from all meanings of truth in all specific truth entities.

(Entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia acapkali dianalisa dan dimaknai terpisah dari cara beradanya, baik yang berskala nasional maupun internasional. Makna kebenaran fenomena *post-truth* seperti itu yang selalu bermuara pada entitas kebenaran solipsisme, karena fenomena *post-truth* secara ontologis tidaklah lahir di ruang hampa dalam proses pemaknaannya, melainkan hidup bersama berdampingan dengan fenomena non *post-truth*. Selain itu entitas kebenaran fenomena *post-truth* secara inheren juga merupakan sebuah pengetahuan yang sangat kabur mengenai realitas, fakta, dan data. Entitas kebenaran fenomena *post-truth* dapat dipahami melalui pendekatan tiga karakter dasar analisa kebenaran secara ontologis, yaitu faktisitas (*facticity*), pemahaman (*understanding*), kejatuhan (*fallenness*). Makna kebenaran fenomena *post-truth* di Indonesia menjadi kian tidak jelas saat eksistensi entitas kebenaran dan esensi kebenaran dijumpuhkan begitu saja tanpa diketahui pembedanya. Memahami entitas kebenaran tertentu merupakan bagian dari analisa ontologis yang berisi tentang makna kebenaran cara berada dalam suatu dunia tertentu, misalnya entitas kebenaran dunia politik. Sedangkan memahami esensi kebenaran merupakan bagian dari analisa ontis yang berisi tentang apa sesungguhnya kebenaran itu. Analisa ontis tentang esensi kebenaran merupakan suatu analisa yang bersifat *resultante* dari semua makna kebenaran pada semua entitas kebenaran tertentu.)

**Kata Kunci:**

*Solipsisme, Post-truth, Entitas kebenaran*

## **Pendahuluan**

Beberapa bulan yang lalu perseteruan mengenai siapa yang layak menjadi pemimpin Negeri ini telah menyita perhatian banyak pihak, mulai dari kalangan lapis bawah sampai elit masyarakat dengan status yang beraneka ragam, mulai orang biasa sampai para kyai, mulai dari partisipan partai sampai elit partai, mulai dari kalangan orang awam sampai kaum terdidik. Sesungguhnya pesta demokrasi dalam rangka pemilihan pemimpin terbaik merupakan hal yang biasa terjadi dalam suatu Negeri, termasuk di Indonesia<sup>1</sup>. Semua orang dari berbagai kalangan dan beragam status sedang berhasrat kuat menentukan seorang pemimpin yang bisa membawa Negara ini pada kejayaan dan kemakmuran. Persoalan mulai muncul ke permukaan di saat akan menentukan sosok pemimpin yang bagaimanakah yang akan dipilih?

Semua kalangan terutama di lingkungan partai politik mulai mendiskusikan sosok pemimpin ideal tersebut sampai pada tingkatan mengkampanyekannya. *Statement* tunggal tak terbantahkan sebagai konsumsi keseharian publik terus dikampanyekan, sehingga secara pelan dan pasti mulai mengafirmasi paparan kebenaran tersebut<sup>2</sup>. Segala daya upaya dilakukan untuk meraih simpati publik terhadap *statement* yang disusun secara sistematis terorganisir, sehingga paparan yang bersifat rasional-ilmiah diabstraksi sebagai suatu kebenaran yang layak diterima. Untaian data dihadirkan ke hadapan publik secara massif dan terencana, sehingga seringkali diterima begitu saja secara kurang kritis bagi sebagian pihak dan ditolak begitu saja bagi sebagian yang lain secara membabi buta.

Kalangan intern partai politik mengelola dengan penuh hati-hati dan berusaha memenuhi unsur argumentatif ilmiah dalam mengambil dan memanfaatkan fakta apapun menjadi data yang *credible* untuk disuguhkan ke ruang publik. Kapabilitas suatu partai politik dalam menyajikan data yang *credible* seringkali dijadikan tolok ukur oleh publik sebagai partai yang membawa pada kemaslahatan umat, bahkan dinilai sebagai partai yang dapat membawa pada kebenaran. Sementara di kalangan publik sendiri seringkali juga menjumbuhkan begitu saja antara fakta dengan opini, khayalan, bahkan imajinasi, karena memang sebagian masyarakat tidak begitu fanatik pada satu kepentingan tertentu, selain mencari kebenaran yang membawa pada kehidupan yang lebih baik. Hal itulah yang sangat kontradiktif antara keinginan mencari kebenaran tanpa embel-embel kepentingan politis apapun dengan keakuratan dalam membedakan antara fakta dengan bukan fakta. Cara berpikir bagi kalangan yang lain, misalnya tokoh agama atau tokoh masyarakat jauh berbeda dengan masyarakat kebanyakan tentang fakta dan bukan fakta<sup>3</sup>. Bagi tokoh agama keakuratan memilah dan memilih fakta merupakan implementasi terhadap kandungan tafsir suatu kitab suci tertentu dalam menentukan arah kebenaran atau kesesatan.

Kebenaran yang didasarkan pada suatu fakta tertentu menjadi sangat multi tafsir bagi semua kalangan, di samping karena fakta memang merupakan wujud langsung dari

---

<sup>1</sup> Esther Mutialita, "Relasi Kebenaran Umum, Kebenaran Ilmiah, Dan Kebenaran Agama Dalam Perspektif Filsafat," *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* 4, no. 1 (2024): 25–31.

<sup>2</sup> Muh. Rizal Hamdi, "PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM DAN KONSEP POLITIK PROFETIK," *journal theosofi* 17, no. 3 (2023): 34–52.

<sup>3</sup> Hadi Karyono, "PARTAI POLITIK, DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM, DAN Mencari SOSOK PEMIMPIN NEGARAWAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," *magistra law review* 05, no. 01 (2024): 11–19.

realitas yang menampakkan diri terhadapnya. Fakta juga sangat berpotensi dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan kebenaran yang akan diusung dan dibelanya. Pertarungan kebenaran sesungguhnya adalah pertarungan tentang seberapa banyak fakta *credible* yang dapat diterima oleh banyak pihak. Kebenaran dalam arti tertentu secara pragmatis merupakan bagian dari pertarungan dan pertarungan yang sangat prestisius dalam mendongkrak popularitas integritas pribadi maupun kelompok. Semakin sering suatu pihak tertentu menghadirkan kebenaran fakta *credible* dalam berkomunikasi dengan masyarakat lapisan manapun, maka integritas diri dan kelompoknya semakin terpercaya dan *rating* popularitasnya kian menanjak tajam<sup>4</sup>.

Fenomena yang terjadi seperti itu dalam konteks mengusung kebenaran berimbas pada bergesernya pertarungan kebenaran menjadi pertarungan fakta yang paling laku terjual dalam *mindset* publik. Otak atik fakta yang *credible* dalam menghadirkan suatu kebenaran yang dapat diterima dan dipercaya oleh publik akan selalu terjadi, sehingga berdampak langsung juga pada integritas pribadi dan kelompok dalam mengejar pengakuan, popularitas, dan populis<sup>5</sup>. Manajemen kebenaran berbasis otak atik fakta akan terus terjadi memenuhi ruang publik seakan berpacu dengan waktu, sehingga kumpulan fakta pun menjadi riuh rendah di hadapan publik secara silih berganti tanpa diketahui validitas dan reliabilitasnya secara pasti.

Kebenaran objektif yang semula merupakan kebenaran berbasis fakta yang relevan, *credible*, dan *valid*, seiring pergesekan kepentingan kemudian pelan namun pasti berganti makna. Kebenaran lalu menjadi kebenaran atas dasar frekuensi kehadiran suatu fakta tertentu yang ditampilkan secara massif, sistematis, dan terorganisir dengan sangat baik ke hadapan publik. Fakta yang acapkali disuguhkan ke ruang publik dengan intensitas yang terukur secara baik akan diterima oleh publik sebagai kebenaran yang harus diakui dan dibela, walaupun sebenarnya sangat jarang diperiksa dengan teliti tentang validitas dan reliabilitasnya. Kebenaran tidak lagi dibaca dalam konteks apakah fakta yang dihadirkan *credible*, *valid*, dan *reliable*, namun lebih pada aspek intensitas kehadiran fakta secara terorganisir dengan baik. Fakta yang dihadirkan dengan intensitas tinggi selalu mendapat apresiasi sebagai kebenaran yang patut diterima dan ditaati oleh publik<sup>6</sup>.

Kondisi seperti itulah yang penulis maksudkan sebagai dialektika antara esensi kebenaran dan entitas kebenaran dalam kajian alam pikir ontologis. Kebenaran dalam dirinya sendiri dengan kandungan bahan yang *credible*, *valid*, dan *reliable* sudah tidak lagi penting. Kebenaran dengan bahan seadanya tapi diorganisir dengan manajemen yang rapi lalu dihadirkan dengan massif dan intensitas tinggi dianggap suatu kebenaran yang dapat dipercaya dan harus ditaati. Kebenaran bergeser dan digeser pada wilayah “*marketing*” dengan “promosi” yang handal dan meyakinkan menggantikan wilayah kebenaran dengan basis *credible*, *valid*, dan *reliable*<sup>7</sup>. Akankah kebenaran dengan basis *credible*, *valid*, dan *reliable*

---

<sup>4</sup> Ayon Diniyanto and Wahyudi Sutrisno, “Pengawasan Pemilihan Umum Di Era Post-Truth : Problem ,” 5, no. 1 (2022): 44–58.

<sup>5</sup> Badrul Munir and Zainul Adzfar, “Kebenaran Di Era Post-Truth Dan Dampaknya Bagi Keilmuan Akidah” 9 (2021): 265–282.

<sup>6</sup> Jusmawati, “Kebenaran Post Truth,” *manajemen kepemimpinan* 13, no. 2 (2021): 205.

<sup>7</sup> siti urbayatun basirah, sumaryati, “Kajian Kebenaran Filosofis Teori Psikologi Humanistik Menurut Rogers,” *PSEJ (Pancasakti Science Education Journal)* 18, no. 3 (2023): 115.

akan terus dimatikan hanya menjadi sebuah entitas kebenaran tertentu oleh tradisi baru di era *post-truth*?

Bertanya tentang “apa sesungguhnya kebenaran itu?” Sama artinya dengan bertanya tentang apa makna kebenaran yang menentukan entitas kebenaran sebagai suatu entitas tertentu.<sup>8</sup> Pertanyaan tentang apa itu kebenaran memang sangat unik karena hal itu berarti bertanya tentang sesuatu yang bukan sesuatu sama sekali, melainkan hal yang menentukan sesuatu sebagai sesuatu. Kebenaran bukan suatu entitas kebenaran tertentu (misalnya, entitas kebenaran dalam fenomena *post-truth*), melainkan merupakan *resultante* dari semua entitas kebenaran. Hal itu tentu menimbulkan suatu persoalan, bahwa siapapun harus bertanya tentang sesuatu jika ingin mendapatkan sebuah jawaban. Namun entitas kebenaran yang mana yang harus dipilih untuk dipertanyakan keberadaannya apabila kebenaran itu memang meliputi semua entitas kebenaran.<sup>9</sup>

Penulis dalam artikel ini hendak mengemukakan satu gagasan, bahwa entitas kebenaran yang harus dipilih untuk dianalisa adalah entitas kebenaran tertentu yang memiliki kapasitas untuk bertanya, yaitu entitas kebenaran atas dasar fenomena *post-truth*. Mengapa demikian? Karena entitas kebenaran dalam fenomena *post-truth* mengandaikan pengetahuan yang sangat kabur tentang realitas, fakta, dan data. Entitas kebenaran berbasis fenomena *post-truth* tidaklah hidup dalam ruang hampa, melainkan berada dalam dunia kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Keberagaman bangsa Indonesia dalam konteks SARA yang didukung oleh merebaknya fenomena *post-truth* dengan *mainstream* mengaduk-ngaduk emosi publik dan keyakinan pribadi, lebih mempengaruhi opini publik daripada fakta yang *credible*, *valid*, dan *reliable*.

Kenyataan secara sederhana dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang “dianggap ada”. Kata dianggap sangatlah penting sebab kata tersebut mencerminkan relativitas. Apa yang ada bagi seseorang belum tentu ada bagi yang lain karena memiliki pandangan yang berbeda tentang sesuatu hal. Ada tidak harus bersifat empiris atau dapat diketahui lewat pancaindera, sebab banyak hal yang dianggap ada tanpa pernah dialami secara empiris.<sup>10</sup>

Carut marut berbagai entitas kebenaran tertentu yang merebak di hadapan publik secara terus menerus lambat laun dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh sebagian kalangan masyarakat. Dalam sudut pandang ontologi kebenaran seperti itu berada dalam level kenyataan yang teronggok begitu saja menunggu terpaparkan sebagai suatu fakta tertentu oleh sebagian yang lain<sup>11</sup>. Fakta yang telah terpapar secara terencana dan terorganisir dengan sangat teliti sampai pada level akurasi yang tinggi secara perlahan tapi pasti akhirnya direguk oleh kebanyakan orang sebagai suatu kebenaran tak terbantahkan. Kebenaran tersebut tiba-tiba menyeruak ke seantero Negeri dan menjadi *trending topic* yang meresahkan berbagai kalangan tertentu.

---

<sup>8</sup>Heidegger, Martin, 1996, *Being and Time* A Translation of ‘*Sein und Zeit*’ terj. Joan Stambaugh New York: State University of New York Press, hlm.

<sup>9</sup>Ibid., hlm. 3

<sup>10</sup>Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm.73

<sup>11</sup> inul aprilia, “Nilai Kebenaran Logika Kepemimpinan,” *Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan* 10, no. 2 (2021): 117.

Kebenaran atas dasar fakta yang *credible*, *valid*, dan *reliable* selalu dituju dan diidamkan oleh setiap orang untuk dinikmati dan menjadi bagian dari dirinya dengan metode internalisasi secara variatif, baik pola, pendekatan, maupun modelnya. Silang sengketa soal eksistensi kebenaran yang berbasis fakta telah memporak porandakan pola pikir berbagai kalangan sampai pada tingkatan saling menyudutkan dan menafikan. Setiap orang berupaya membela entitas kebenaran yang diyakini dengan bekal pengetahuan yang dimiliki, memori pengalaman yang disadari, dan wawasan yang melekat pada cara pandangnya telah ikut meramaikan hiruk pikuk diskursus tentang kebenaran, baik bagi diri pribadi maupun kelompok.

Makna kebenaran dalam bentuknya sebagai entitas kebenaran tertentu secara ontologis memiliki cara mengada yang khas pada saat diimplementasikan ke berbagai pola tindakan, sesuai dengan tafsir keberpihakannya terhadap suatu fenomena tertentu pula. Idealisme subjektif secara khusus mengingatkan, bahwa dunia ini sesungguhnya berisi kumpulan berbagai abstraksi-abstraksi subjek tentang sesuatu hal, sehingga kebenaran non-ego sangatlah ditentukan oleh tafsir ego yang berpikir.<sup>12</sup> Persepsi inderawi yang kemudian dilanjutkan dengan proses abstraksi akal dan dihayati sebagai pengalaman eksistensial serta berakhir pada keyakinan personal yang begitu kuat dalam menafsirkan dan memaknai sesuatu hal yang berada di luar dirinya, telah melahirkan berbagai pola entitas kebenaran yang diyakini oleh satu pihak sekaligus ditolak oleh pihak yang lain. Makna kebenaran dalam fenomena entitas kebenaran tertentu selalu menjadi ajang pergulatan heroik dalam berbagai bentuknya, seperti fakta hasil saling persepsi, hasil abstraksi, dan hasil penghayatan eksistensial untuk dihadirkan ke ranah publik. Semua pihak yang berkepentingan saat menerima kehadiran suatu entitas kebenaran yang diyakini oleh sebagian kalangan masyarakat sebagai sebuah argumentasi ilmiah, sesungguhnya mereka sedang memahami kenyataan yang terpampang di hadapannya<sup>13</sup>.

Entitas Kebenaran tidak pernah teronggok begitu saja tanpa sentuhan persepsi, abstraksi maupun penghayatan eksistensial subjek. Setiap orang selalu berlomba menghadirkan sentuhan persepsi, abstraksi maupun penghayatan eksistensialnya dengan berbagai cara yang dianggap bisa mempengaruhi khalayak dengan berbagai tingkatan strata sosialnya. Entitas kebenaran sebagai sebuah kenyataan (*dasein*<sup>14</sup>) yang telah dipersepsi, diabstraksi, dan dihayati tentu telah berubah secara otomatis menjadi kumpulan fakta yang sarat dengan muatan nilai tertentu. Bagi sebagian kalangan entitas kebenaran yang telah berubah menjadi sebuah fakta tersebut dianggap memiliki makna yang penting, namun bagi

---

<sup>12</sup>Solomon, R. C., dan Higgins, K. M., *A Short History of Philosophy*, Oxford University Press, New York, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, 2012, Sejarah Filsafat, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, hlm.122

<sup>13</sup> Fero Natanael Mokoagow; Fitzgerald Kennedy Sitorus, "Menyingkap Kebenaran Dalam Era Post-Kebenaran: Telaah Hermeneutik Heideggerian Atas Media Kontemporer," n.d.

<sup>14</sup>Ismail Al-'Alam, *Problem Dualisme dalam Ontologi Filsafat Barat Modern dan Pascamodern*, TASFIYAH: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017, Available at: <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tasfiyah>  
<http://dx.doi.org/10.21111/tasfiyah.v1i2.1852>, hlm. 238

sebagian kalangan yang lain fakta tersebut dianggap tidak memiliki relevansi dengan kebermaknaan hidupnya.

Fakta dalam hal ini dimaknai sebagai pernyataan tentang kenyataan. Seseorang yang menceritakan suatu kejadian pada dasarnya sedang mengemukakan fakta. Fakta selalu bersifat “subyektif”, karena didasarkan pada sudut pandang tertentu. Kenyataan yang sama dapat saja dikemukakan dengan cara yang berbeda. Fakta juga dapat dikatakan “obyektif” karena selalu didasarkan pada suatu kenyataan tertentu, karena pernyataan yang tidak didasarkan pada suatu kenyataan tertentu pastilah bukan fakta, namun lebih tepat disebut karangan, khayalan, atau imajinasi. Fakta dapat menjadi sebuah data bagi sebagian masyarakat karena dianggap relevan dengan makna kebenaran yang dimaksud, sehingga tidak semua fakta merupakan data bagi sebagian masyarakat yang lain.<sup>15</sup>

Implementasi makna kebenaran yang berwujud ke dalam berbagai fenomena kehidupan sesungguhnya telah diposisikan sebagai objek telaah oleh banyak pihak dengan cara analisisnya masing-masing. Dalam kajian ontologi berbagai fenomena kehidupan sebagai wujud makna kebenaran itulah yang kemudian disebut dengan entitas kebenaran. Entitas kebenaran pada berbagai fenomena kehidupan yang terus dihadirkan ke ruang publik seakan menghipnotis setiap orang untuk merengkuhnya menjadi bagian tak terpisahkan dari keyakinan dirinya yang akan terus dibela sepanjang hayat dikandung badan. Setiap orang berlomba-lomba menyajikan setumpuk argumentasi ilmiah untuk disuguhkan pada sebanyak mungkin kalangan agar dapat menerima kebenaran yang diyakini dirinya, sehingga juga menjadi kebenaran bagi banyak kalangan. Setiap orang juga berkehendak menggiring entitas kebenaran yang diyakini dirinya agar dapat terinternalisasi pada banyak kalangan secara sistematis terorganisir menjadi sebuah kebenaran yang tak terbantahkan<sup>16</sup>.

Berbagai entitas kebenaran akan terus disiarkan secara masif dan terorganisir dengan berbagai pendekatan, model, dan pola yang sangat variatif pada *timing* yang juga berbeda, sehingga secara pelan namun pasti akan terinternalisasi menjadi kebenaran bagi banyak kalangan dari berbagai tingkatan strata kehidupan sosial. Para penebar kebenaran dari entitas kebenaran yang diusungnya tersebut memiliki kesadaran yang *meaning full* tentang kodrat dasar fakta yang bisa berubah menjadi data manakala fakta yang disajikan dapat dipilih sebagai fakta yang relevan oleh banyak pihak. Dengan kesadaran yang sama pula mereka sangat memahami, bahwa entitas kebenaran yang diyakini dirinya akan ditepiskan, bahkan dinafikan apabila entitas kebenaran tersebut tidak memiliki relevansi signifikan dengan keyakinan publik.

Makna kebenaran dari suatu entitas kebenaran tertentu yang diyakini kebenarannya bagi sebagian kalangan merupakan kebenaran yang harus dibela dan diperjuangkan terus supaya tetap menjadi keyakinan banyak kalangan di masyarakat. Ketidak bermaknaan suatu entitas kebenaran karena dianggap tidak relevan dengan pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan sebagian pihak sesungguhnya adalah kegagalan dalam menyuguhkan entitas kebenaran tersebut secara argumentatif. Suatu entitas kebenaran memiliki relevansi ataupun tidak relevan dengan muatan nilai yang diyakini publik merupakan hal yang alami dari sebuah pergulatan pemaknaan kebenaran. Hal itulah yang acapkali memacu dan memicu

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian* hlm.75

<sup>16</sup> Qoidul Khoir, “Pancasila Sebagai Paradigma Pendidikan Karakter Di Era Post- Truth : Mengatasi Kontradiksi Informasi Hoaks Kebenaran” 5, no. 2 (2024): 170–181.

strategi pengorganisasian secara akurat kebenaran suatu entitas kebenaran pada wilayah publik. Bertebarannya berbagai entitas kebenaran di wilayah publik memaksa banyak orang melakukan proses pemilahan dan pemilihan guna menyeleksi suatu entitas kebenaran yang sesuai dengan muatan nilai yang diyakininya. Linieritas keilmuan, kedalaman wawasan, dan keluasan pengalaman seseorang berpengaruh sangat besar dalam mengelola dan menghadirkan entitas kebenaran yang *credible*, *valid*, dan *reliable* bagi sebanyak mungkin lapisan masyarakat.

Setiap entitas kebenaran berpotensi kuat untuk dipilah, diseleksi, dan dipilih sebagai data yang mesti dirancang, disistematisasikan, diorganisir, dan diperjuangkan agar pada akhirnya diakui dan diterima menjadi keyakinan publik. Data dimaknai sebagai fakta yang relevan dan berkaitan secara logis dengan paradigma yang digunakan untuk memaknai kebenaran. Data adalah fakta yang telah dipilih dan diseleksi berdasarkan atas relevansinya. Entitas kebenaran sebagai hasil pencerapan persepsi, analisa abstraksi, dan penghayatan eksistensial berbagai individu dan kelompok tertentu merupakan fakta yang bertebaran dimana-mana. Akan tetapi, tidak semua entitas kebenaran tersebut akan dipilah, dipilih, dan diseleksi sebagai kebenaran dalam jagad diskursus pemaknaan kebenaran.<sup>17</sup>

Entitas kebenaran sebagai akumulasi dari pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang dimiliki oleh sebagian kalangan masyarakat sangat boleh jadi hanya sebuah fakta yang ditepiskan karena tidak memiliki relevansi dengan entitas kebenaran yang diyakini. Bahkan suatu entitas kebenaran berpotensi kuat hanya menjadi sebuah kenyataan yang teronggok begitu saja tanpa kepedulian untuk dihadirkan pada ranah publik. Konflik kebenaran di era *post-truth* sesungguhnya bagian dari pertarungan dan pertarungan di wilayah publik pada ranah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang dimiliki oleh setiap individu dan kelompok dalam dialektika ontologis tentang kebenaran dan entitas kebenaran. Suatu dialektika antara kebenaran sebagai kenyataan yang penuh dengan muatan nilai tertentu, makna kebenaran sebagai fakta, dan entitas kebenaran sebagai data yang dikelola secara baik untuk dihadirkan secara masif dengan intensitas tinggi ke wilayah publik.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi fenomenologi data dengan mengumpulkan seluruh data dari fakta dilapangan dan membandingkan data dalam kepustakaan, sehingga peneliti merupakan instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Data seperti apa yang harus dikumpulkan sangat bergantung pada peneliti. Penelitian ini menggunakan objek formal ontologi, sehingga keterangan atau dugaan sementara berkaitan dengan karakteristik berpikir kefilosafatan, yaitu rasional, radikal, holistik dan reflektif.

Jalan dalam pengambilan data berupa kemunculan fenomena yang akan dilakukan dari awal sampai akhir adalah sebagai berikut, *pertama*, mengumpulkan data sesuai dengan ruang lingkup penelitian. *Kedua*, membuat sistematisasi data. *Ketiga*, data diklasifikasikan untuk menentukan data primer dan sekunder. *Keempat*, evaluasi dan eliminasi data sesuai klasifikasi data yang dilakukan. *Kelima*, data dianalisis sesuai dengan metode yang dipilih. *Keenam*, menyusun rencana hasil penelitian. *Ketujuh*, menyusun laporan hasil penelitian.

---

<sup>17</sup>Ibid., hlm.77



Tahap analisis data yang akan dilakukan adalah *pertama*, analisis data pada waktu pengumpulan data. Analisis tersebut melalui proses *verstehen* dan interpretasi, karena data yang hendak dikumpulkan bersifat verbal-deskriptif. *Kedua*, proses analisis data setelah pengumpulan data, yaitu melalui proses reduksi, display, dan heuristika. Validasi data temuan dicek dengan menggunakan teknik pengecekan data, yaitu teknik triangulasi.

## Hasil dan Pembahasan

### Era Post-Truth

Era *post-truth* digambarkan dalam kamus Oxford sebagai suatu kondisi dengan mainstream, bahwa emosi dan kepercayaan pribadi lebih mempengaruhi opini publik daripada fakta objektif. Kata tersebut mendapat predikat *Word of The Year* pada tahun 2016 dari Oxford Dictionaries.<sup>18</sup> Popularitas kata tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2016, walaupun sudah ada sejak dua dekade terakhir. *Post-truth* dimaknai sebagai suatu kondisi dimana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal. Dalam situasi tersebut informasi tanpa fakta sangat berpengaruh dibandingkan fakta yang sebenarnya.

*Mainstream post-truth* sebagai suatu era baru ditandai dengan hal-hal sebagai berikut, yaitu *pertama*, kehidupan masyarakat di semua lapisan dikelola dengan hal-hal yang bersifat emosional. *Kedua*, kebermaknaan kehidupan didasarkan pada pengabaian fakta dan data. *Ketiga*, mengutamakan dan memviralkan berita yang kredibilitas, validitas, dan reliabilitasnya belum terjamin. *Keempat*, mengkombinasikan gerakan populis dengan teori konspirasi yang masih butuh diuji lagi kebenarannya. *Kelima*, penyebarluasan secara terorganisir rapi setiap narasi fiktif mengenai sosok figur yang layak jual ataupun peristiwa tertentu. *Keenam*, memoles ketidakjujuran dalam membangun opini untuk memperkuat posisi sosial figur, kelompok, atau kepentingan tertentu dalam masyarakat yang semakin terbiasa dengan pemanfaatan fasilitas audio-visual, *online*, android, dan media sosial lainnya.<sup>19</sup>

*Post-truth* merupakan suatu fenomena yang terjadi ketika *hoax*, *fake news*, dan *false news* dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menggelorakan letupan emosi dan sentimen publik. Di samping itu juga memanfaatkan ruang gerak yang bebas media digital yang begitu masif dan luas dengan memanfaatkan *hoax*, *fake news*, dan *false news* sebagai tunggangan sekaligus alat elaboratif pemaknaan kebenaran. Era *post-truth* secara umum ditandai dengan merembaknya fenomena *hoax*, *fake news*, dan *false news* di media sosial dan ditandai pula dengan ketidakimbangan media dan jurnalisme dalam menghadapi pernyataan bohong dari banyak pihak yang memiliki kepentingan terhadap kekuasaan Negara. Internet sebagai media yang digunakan untuk memfasilitasi kecepatan informasi turut andil dalam terciptanya kualitas produk jurnalisme.<sup>20</sup>

<sup>18</sup>Budi Kurniawan, *Politisasi Agama di Tabun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman Bagi Demokrasi*, Jurnal Sosiologi Agama - ISSN (p) 1978-4457, ISSN (e) 2548-477X Vol. 12, No. 1, Januari-Juni, 2018, pp. 133-154. doi: <http://dx.doi.org/10.14421/jsa.2018/121-07.133-154>, hlm.135

<sup>19</sup>Dudi Hartono, 2018, *Era Post-Truth: Melawan Hoax dengan Fact Checking*, Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan, hlm.74

<sup>20</sup>Ibid., hlm.71

Data Dewan Pers di tahun 2015 merilis sedikitnya 500 laporan pengaduan yang diterima terkait pelanggaran kode etik. Laporan pengaduan pada tahun 2016 mengalami kenaikan selama setahun dari 2015 yang diterima oleh Dewan Pers sekitar 800 laporan. Sementara di akhir 2017 mencapai lebih dari 1.000 aduan. Bentuk pelanggaran yang sering dilakukan jurnalis adalah tidak melakukan konfirmasi dan hanya melalui *interview* sepihak dalam menulis berita, sehingga kebenaran dari berita tersebut patut dipertanyakan. Pola kerja jurnalis seperti itu menjadi gejala *post-truth* di era digital seperti saat ini. Di era *post-truth* batas antara kebenaran dan entitas kebenaran, kejujuran dan kebohongan, serta fiksi dan fakta menjadi semakin kabur.<sup>21</sup>

### **Makna Kebenaran dalam Era *Post-Truth*: Apropriasi**

Apropriasi merupakan suatu istilah yang dipakai oleh Paul Ricœur untuk menunjuk pada suatu proses interpretasi yang menjadikan makna teks (telaah epistemologis) sebagai milik si penafsir, sehingga pada akhirnya merubah cara berada (telaah ontologis) si penafsir. Tujuan interpretasi bukan semata-mata bersifat epistemologis, melainkan juga bersifat ontologis.<sup>22</sup> Makna teks dalam hal ini adalah makna entitas kebenaran *post-truth* (sebagai teks) menjadi milik si penafsir setelah diinterpretasikan oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai bagian dari keyakinan dirinya. Makna entitas kebenaran *post-truth*, seperti *hoax*, *fake news*, dan *false news* telah diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga menjadi suatu keyakinan personal bagi sebagian pihak yang memiliki pandangan yang sama. Keyakinan personal yang kemudian tereskalasi menjadi keyakinan kelompok tersebut itulah yang terus disajikan secara masif dengan intensitas yang tinggi pada sebanyak mungkin kalangan. Sisi epistemologis fenomena *post-truth* diinternalisasi ke dalam intelektualitas publik dengan argumentasi yang disistematiskan secara ilmiah-logis sebagai pengetahuan ilmiah.

Sisi epistemologis fenomena *post-truth* tersebut ikut serta pula merubah cara berada (telaah ontologis) si penafsir. Makna entitas kebenaran *post-truth* dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama telah merubah cara berada banyak kalangan, sehingga terjerembab ke dalam pusaran makna kebenaran solipsisme. Suatu pola pemaknaan kebenaran yang meletakkan diri pribadi sebagai ukuran tunggal dalam menginterpretasikan setiap fenomena yang terjadi. Setiap makna kebenaran selalu berawal dari keyakinan personal dirinya dan begitu juga setiap makna kebenaran selalu berakhir pada keyakinan personal dirinya sebagai tolok ukur yang mesti diikuti. *Mainstream* aliran solipsisme memposisikan diri pribadi menjadi instrumen tunggal dalam memaknai tafsir fenomena sebagai suatu entitas kebenaran tertentu. Solipsisme sekaligus pula mendudukan diri pribadi sebagai penentu kriteria salah dan benar pada setiap tafsir fenomena yang dianalisa.<sup>23</sup>

Fenomena *post-truth* di Indonesia dapat pula ditelaah dari sisi ontologis sebagai bagian tak terpisahkan yang melengkapi pemaknaan dari sisi epistemologisnya. Sisi ontologis fenomena *post-truth* di Indonesia dapat dipahami melalui pemaknaan dengan

---

<sup>21</sup>Khaerudin Imawan, 2018, *Jurnalisme Data Resistensi Ruang Siberdi Era Post Truth*, Jurnal Signal Unswagati Cirebon, hlm. 3-4

<sup>22</sup>Donny Gahril Adian, 2010, *Matinya Metafisika Barat*, Jakarta: Komunitas Bambu, hlm.114

<sup>23</sup>Solomon, *Sejarah Filsafat*, hlm.122

menggunakan pendekatan tiga karakter dasar analisa kebenaran secara ontologis, yaitu *pertama*, faktisitas (*facticity*). *Kedua*, pemahaman (*understanding*). *Ketiga*, kejatuhan (*fallenness*).<sup>24</sup>

Faktisitas (*facticity*) makna kebenaran secara ontologis adalah makna kebenaran yang terlempar begitu saja ke suatu dunia tertentu yang bukan suatu dunia tertentu buatannya, melainkan suatu dunia tertentu yang terwarisi secara historis.<sup>25</sup> Makna kebenaran tentang fenomena *post-truth* makin terpahami dengan jelas salah satunya dengan memahami makna “keterlemparan begitu saja” ke suatu Negeri yang mayoritas berpenduduk muslim, yaitu Indonesia. Kata seakan “terlempar begitu saja” menyiratkan, bahwa fenomena *post-truth* memiliki makna yang terpahami secara khas dan unik saat bersentuhan dengan berbagai fenomena yang terjadi di Indonesia.

Makna kebenaran tentang fenomena *post-truth* di Indonesia selalu berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, yaitu, *pertama*, rendahnya kualitas dan kredibilitas isi dari suatu informasi yang diterima masyarakat itu sendiri. *Kedua*, jumlah literasi yang begitu minim yang dimiliki oleh masyarakat. *Ketiga*, kurangnya kemampuan yang memadai dalam menimbang, memilah, atau bahkan menilai suatu informasi tertentu pada level yang *valid* ato tidak *valid*. *Keempat*, masyarakat dalam arti tertentu tidak memiliki kecukupan kecakapan dalam menentukan suatu informasi yang benar (*real news*), yang palsu (*fake news*), atau yang keliru (*false news*).<sup>26</sup>

Situasi semacam itulah yang kemudian menumbuhkan suburkan perkembangan *hoax* di tengah masyarakat. Hal lain yang juga berperan serta dalam situasi seperti itu adalah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan sangat pesat membanjiri kehidupan masyarakat luas. Selain itu, Jaringan internet dan sarana media baru telah mengubah hubungan khalayak (*audience*) dengan media. Berbagai *platform* media baru yang populer yang kemudian disebut media sosial (*social media*) telah pula membuat hubungan khalayak dan media berada dalam hubungan interaktif.

Jumlah informasi yang begitu fantastis yang dihasilkan melalui *platform* media sosial menempatkan masyarakat pada posisi yang bingung dalam memilih informasi yang diyakini. Bahkan sebagian besar informasi yang tersedia di ranah publik bersifat kontradiktif dan tidak koheren antara yang satu dengan yang lain. Semua hal itu bisa dipahami jika menelisik pada proses kerja produksi informasi yang diviralkan melalui *platform* media sosial, pada umumnya mengabaikan proses kerja jurnalistik yang mengedepankan akurasi, verifikasi fakta (*fact checking*), etika, dan hukum jurnalistik. Masyarakat luas sudah barang tentu bukanlah jurnalis profesional yang terikat pada kode etik jurnalistik, sehingga walaupun tidak disengaja tapi tetap saja informasi yang dihasilkan sangat mungkin bias. Fakta semacam itulah yang kemudian menyuburkan perkembangan *hoax* di Indonesia.

Arti pemahaman (*understanding*) secara ontologis dalam konteks makna kebenaran menunjukkan, bahwa makna kebenaran terimplementasi sebagai salah satu entitas kebenaran yang memiliki kemungkinan dapat memahami makna berada dalam suatu entitas kebenaran tertentu.<sup>27</sup> Makna kebenaran dalam konteks entitas kebenaran tertentu berkaitan langsung dengan masa depan yang semakin tercerahkan, baik bagi diri pribadi, kelompok,

<sup>24</sup>Heidegger, *Being and Time*, hlm. 164

<sup>25</sup>Ibid

<sup>26</sup>Hartono, *Era Post-Truth*, hlm.70

<sup>27</sup>Heidegger, *Being and Time*, hlm. 134

maupun bangsa dan Negara sebagai hasil suatu aktivitas pemahaman. Makna kebenaran tentang fenomena *post-truth* di Indonesia sangat memungkinkan untuk dapat memahami pernyataan mengenai, “Makna berada dalam entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia”. Makna berada dalam entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia semakin menguatkan analisa, bahwa keyakinan personal yang ditopang dengan ghirah pada ranah letupan sesaat emosi khalayak makin menjauhkan harapan, keinginan, cita-cita bangsa Indonesia tentang sebuah Negara yang aman, damai, dan tentram.

Pemahaman yang dimaksud sebagai bagian dari analisa ontologis dalam artikel ini bukanlah pemahaman yang bersifat *cognitive* melainkan bersifat praksis. Pemahaman tentang makna kebenaran *post-truth* di Indonesia bukanlah pemahaman teoritis, namun pemahaman yang langsung saling berkaitan dengan faktisitas makna kebenaran. Dalam konteks keindonesiaan maka pemahaman tersebut saling berkaitan dengan makna entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia. Faktisitas makna berada dalam entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia bertali kelindan dengan makna entitas kebenaran negara Indonesia, misalnya tentang asas kekeluargaan, dakwah wali songo, pancasila, dan keberagaman. Arti pemahaman dalam hal ini juga berkaitan dengan spasio-temporal, bahwa makna kebenaran *post-truth* di Indonesia tentu dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinan yang tersedia dalam mengimplementasikan, misalnya implementasi makna Pancasila. Kemungkinan yang tersedia tersebut, misalnya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tradisi adat istiadat yang berlaku secara turun temurun.

Arti kejatuhan (*fallenness*) dalam konteks entitas kebenaran maksudnya, bahwa entitas kebenaran tertentu hadir bukan sebagai dirinya sendiri, melainkan hadir sebagai entitas kebenaran pada umumnya dengan basis makna kebenaran sesuai spasio-temporalnya masing-masing. Kejatuhan entitas kebenaran merupakan karakter yang selalu berpaling dari entitas kebenaran dalam dirinya untuk menuju pada entitas kebenaran umum yang dipakai khalayak saat berpikir, berbicara, dan bertindak tentang entitas kebenaran tertentu.<sup>28</sup>

Kejatuhan entitas kebenaran tentang fenomena *post-truth* di Indonesia selalu berada dalam *mainstream* keindonesiaan, misalnya selalu berpikir, berbicara, dan bertindak, seperti pada umumnya berbagai kalangan menganalisa *post-truth* dalam kaitannya dengan berbagai fenomena yang terjadi di Indonesia, misalnya tentang pemilihan presiden Indonesia. Kejatuhan entitas kebenaran tentang *post-truth* di Indonesia selalu dianalisa bersama-sama dengan entitas kebenaran lain, misalnya tentang sisi kultural orang Indonesia dan perkembangan jurnalisme di Indonesia. Cara berpikir, berbicara, dan bertindak dari rata-rata model penganalisaan *post-truth* di Indonesia itulah yang juga menjadi entitas kebenaran yang dianut sebagian besar rakyat Indonesia. Entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia merupakan “*common sense*” sebagai sebuah analisa yang dianut secara bersama-sama oleh semua pihak yang menggunakan rata-rata model yang sama dalam menganalisa *post-truth* di Indonesia.

Analisa tentang entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia tidak bisa dipisahkan begitu saja dari entitas kebenaran sisi kultural orang Indonesia dan entitas kebenaran jurnalisme di Indonesia. Entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia secara inheren memuat tentang seluk beluk *hoax*, *fake news*, dan *false news*. Namun entitas kebenaran tentang perkembangan

---

<sup>28</sup>Ibid., hlm. 157

jurnalisme di Indonesia sangat tidak mungkin dilepaskan dari entitas kebenaran *post-truth* yang di dalamnya memuat tentang seluk beluk *hoax*, *fake news*, dan *false news*. Entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia harus keluar dari dirinya untuk menuju pada *mainstream* entitas kebenaran jurnalisme di Indonesia, sehingga kejatuhan (*fallenness*) entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia dapat dipahami dengan baik.

Entitas kebenaran *post-truth* tidaklah berdiri sendiri, seperti di ruang hampa, namun berdampingan dengan entitas kebenaran lain, misalnya entitas kebenaran jurnalisme di Indonesia. Kepahaman semua kalangan tentang fenomena *post-truth* di Indonesia kian jelas manakala dianalisa secara berdampingan dengan fenomena jurnalisme di Indonesia. *Hoax*, *fake news*, dan *false news* dapat dijelaskan dan dipahami dengan sangat baik apabila dipaparkan dalam kaitannya dengan perkembangan dunia jurnalisme di Indonesia.

Pemahaman yang dihasilkan dalam memaknai entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia tanpa mengikut sertakan entitas kebenaran jurnalisme di Indonesia akan berdampak pada proses penafsiran makna kebenaran yang bersifat solipsisme. Suatu makna kebenaran dengan *mainstream* tolok ukur keyakinan pribadi sebagai penentu terakhir, sehingga proses pemaknaan kebenaran yang seperti itu hanya akan menghasilkan luapan emosi yang tiada berujung pangkal. Entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia selamanya akan bermuara pada pemaknaan yang bersifat solipsisme jika fenomena *post-truth* tersebut selalu dianalisa terpisah dari konteks keberadaannya, baik konteks yang berskala nasional maupun yang berskala internasional.

Dampak berikutnya adalah makna kebenaran dalam suatu entitas kebenaran tertentu, seperti *post-truth* di Indonesia menjadi kian tidak jelas saat eksistensi entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia dan esensi kebenaran dijumbuhkan begitu saja tanpa diketahui pembedanya. Memahami entitas kebenaran tertentu merupakan bagian dari analisa ontologis, yaitu menganalisa tentang makna kebenaran dalam suatu dunia tertentu, misalnya dalam dunia politik. Sedangkan memahami esensi kebenaran merupakan bagian dari analisa ontis, yaitu menganalisa tentang apa itu kebenaran. Analisa ontis tentang esensi kebenaran merupakan suatu analisa yang meliputi semua makna kebenaran pada semua entitas kebenaran tertentu.<sup>29</sup>

Entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia secara ontologis telah disalah pahami sebagai “ada” (*Being*) daripada “adaan” (*Beings*). Hal itu memuat makna, bahwa entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia semestinya diposisikan sebagai dunia benda-benda (*adaan/beings*) yang bereksistensi bersama dengan semua entitas kebenaran non *post-truth* di Indonesia. Entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia merupakan adaan karena tidak bisa keluar dari dirinya untuk menganalisa dirinya sendiri. Sedangkan apabila entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia dipahami sebagai ada (*being*), maka sesungguhnya entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia telah dipahami sebagai entitas kebenaran yang hadir berjarak di luar subjek yang menganalisanya. Sebab subjek yang menganalisa fenomena *post-truth* di Indonesia bukan dua hal yang berhadapan-hadapan, namun subjek yang menganalisa selalu sudah berada bersama dalam fenomena *post-truth* di Indonesia.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Donny Gahril Adian, *Senjakala Metafisika Barat dari Hume hingga Heidegger*, Jakarta: Penerbit Koekoesan. 2012, hlm. 83

<sup>30</sup>Adian, *Matinya Metafisika Barat*, hlm. 58-59

## Penutup

Fenomena *post-truth* di Indonesia tidaklah lahir dalam ruang hampa dalam proses pemaknaannya, melainkan hidup bersama berdampingan dengan fenomena non *post-truth*. Entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia dapat dipahami melalui pendekatan tiga karakter dasar analisa kebenaran secara ontologis, yaitu faktisitas (*facticity*), pemahaman (*understanding*), kejatuhan (*fallenness*). Makna fenomena *post-truth* di Indonesia dalam tiga karakter dasar analisa kebenaran secara ontologis menunjukkan, bahwa *pertama*, “faktisitas” fenomena *post-truth* di Indonesia bermakna keterlemparan pada dunia non *post-truth* sebagai warisan historis yang hidup bersama secara berdampingan. *Kedua*, “pemahaman” fenomena *post-truth* di Indonesia bermakna bukanlah pemahaman yang bersifat *cognitive* melainkan bersifat praksis, pemahaman yang langsung saling berkaitan dengan faktisitas makna cara berada dengan keluar dari dirinya. *Ketiga*, “kejatuhan” fenomena *post-truth* di Indonesia bermakna hadir bukan sebagai dirinya sendiri, melainkan hadir sebagai entitas kebenaran pada umumnya dengan basis makna kebenaran sesuai spasio-temporalnya masing-masing. Makna kejatuhan fenomena *post-truth* di Indonesia mengacu pada cara berpikir, berbicara, dan bertindak rata-rata orang Indonesia mengenai entitas kebenaran *post-truth*.

Entitas kebenaran *post-truth* di Indonesia telah melahirkan dialektika yang tiada berkesudahan tentang kebenaran di satu pihak dan entitas kebenaran di pihak yang lain. Dialektika antara makna ada (*being*) yang berorientasi pada cara berada di satu pihak dengan makna adaan (*beings*) yang berorientasi pada apa itu ada di pihak yang lain. Dialektika antara analisa ontologis yang bersifat praksis-eksistensial di satu pihak dengan analisa ontis yang bersifat teoritis-esensial di pihak yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi Kurniawan, *Politisasi Agama di Tabun Politik: Politik Pasca-Kebeneran di Indonesia dan Ancaman Bagi Demokrasi*, Jurnal Sosiologi Agama - ISSN (p) 1978-4457, ISSN (e) 2548-477X Vol. 12, No. 1, Januari-Juni, 2018, pp. 133-154. doi: <http://dx.doi.org/10.14421/jsa.2018/121-07.133-154>
- Basirah, sumaryati, siti urbayatun. “Kajian Kebeneran Filosofis Teori Psikologi Humanistik Menurut Rogers.” *PSEJ (Pancasakti Science Education Journal)* 18, no. 3 (2023): 115.
- Diniyanto, Ayon, and Wahyudi Sutrisno. “Pengawasan Pemilihan Umum Di Era Post-Truth : Problem ,” 5, no. 1 (2022): 44–58.
- Donny Gahril Adian, 2010, *Matinya Metafisika Barat*, Komunitas Bambu, Jakarta
- Donny Gahril Adian, 2012, *Senjakala Metafisika Barat dari Hume hingga Heidegger*, Penerbit Koekoesan, Jakarta
- Dudi Hartono, 2018, *Era Post-Truth Melawan Hoax dengan Fact Checking*, Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan
- Hadi Karyono. “PARTAI POLITIK, DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM, DAN Mencari Sosok Pemimpin Negarawan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *magistra law review* 05, no. 01 (2024): 11–19.
- Hamdi, Muh. Rizal. “PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM DAN KONSEP POLITIK PROFETIK.” *journal theosofi* 17, no. 3 (2023): 34–52.
- Heidegger, Martin, 1996, *Being and Time A Translation of ‘Sein un Zeit’* terj. Joan

- Stambaugh, State University of New York Press, New York
- Inul aprilia. "Nilai Kebenaran Logika Kepemimpinan." *Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan* 10, no. 2 (2021): 117.
- Ismail Al-'Alam, *Problem Dualisme dalam Ontologi Filsafat Barat Modern dan Pascamodern*, TASFIYAH: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017, Available at: <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tasfiyah>  
<http://dx.doi.org/10.21111/tasfiyah.v1i2.1852>
- Jusmawati. "Kebenaran Post Truth." *manajemen kepemimpinan* 13, no. 2 (2021): 205.
- Khoir, Qoidul. "Pancasila Sebagai Paradigma Pendidikan Karakter Di Era Post- Truth : Mengatasi Kontradiksi Informasi Hoaks Kebenaran" 5, no. 2 (2024): 170–181.
- Khaerudin Imawan, 2018, *Jurnalisme Data Resistensi Ruang Siberdi Era Post Truth*, Jurnal Signal Unswagati, Cirebon
- Munir, Badrul, and Zainul Adzfar. "Kebenaran Di Era Post-Truth Dan Dampaknya Bagi Keilmuan Akidah" 9 (2021): 265–282.
- Mutialita, Esther. "Relasi Kebenaran Umum, Kebenaran Ilmiah, Dan Kebenaran Agama Dalam Perspektif Filsafat." *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora 4, no. 1 (2024): 25–31.
- Sitorus, Fero Natanael Mokoagow; Fitzgerald Kennedy. "Menyingkap Kebenaran Dalam Era Post-Kebenaran: Telaah Hermeneutik Heideggerian Atas Media Kontemporer," n.d.
- Solomon, R. C., dan Higgins, K. M., 2012, *A Short History of Philosophy*, Oxford University Press, New York, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Sejarah Filsafat, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta
- Sugiyonom, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung